

MAGISTER HUKUM



Perpustakaan Pusat
Universitas
Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara
No.9, Kebon Jeruk,
Jakarta 11510
(021) 5674223 ext 282
(021) 5674152
(hunting), Fax (021)
5674248



Hukum Kontrak

Author : Syaifuddin, Muhammad

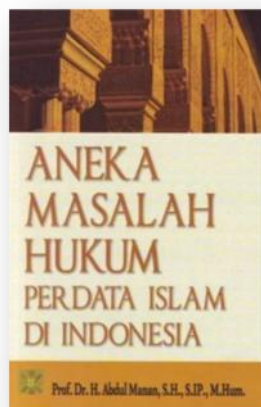
No. Class: 346.02 SYA h

Description : Buku ini membahas kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum, sehingga lebih sistematis, komprehensif, mendalam, dan bernuansa praktis dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang juga membahas tentang hukum kontrak.

Keseluruhan materi yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, mencakup: 1) istilah dan pengertian-pengertian dasar kontrak dan hukum kontrak; 2) fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak; 3) subjek dan objek hukum kontrak; 4) asas-asas hukum kontrak; 5) syarat-syarat sahnya suatu kontrak; 6) bentuk dan jenis kontrak; 7) perancangan, anatomi akta dan bahasa hukum kontrak; 8) kontrak baku; 9) kontrak elektronik; 10) kontrak internasional; 11) penafsiran kontrak; 12) wanprestasi dan ganti rugi; 13) keadaan memaksa, keadaan sulit, dan risiko dalam pelaksanaan kontrak; 14) penyelesaian sengketa hukum kontrak; dan 15) berakhirnya atau hapusnya kontrak dan perikatan yang bersumber dari kontrak.

Buku ini sangat berguna secara akademis bagi mahasiswa-mahasiswa di fakultas hukum pada tingkat (strata 1), magister (strata 2), bahkan doktor (strata 3). Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa di fakultas ekonomi dan fakultas teknik, karena hukum kontrak dalam buku ini dipahami sebagai sumber hukum perikatan bisnis/dagang/jasa konstruksi sebagai inti materi mata kuliah hukum bisnis/dagang di fakultas ekonomi dan hukum kontrak konstruksi di fakultas teknik, baik pada tingkat sarjana (strata 1) maupun magister (strata 2).

Aneka masalah hukum perdata islam



Author : Manan Abdul

No. Class : 297.44 MAN a

Description: Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Aneka masalah tersebut diuraikan secara logis, sistematis, dan filosofis dengan memadukan teori dan praktik sehingga mudah untuk dijadikan pedoman bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dan masyarakat umumnya.

Hukum tata Negara

Author : Dedi Ismatullah
No. Class: 342.598 ISM h

Description : Hukum tata negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu, berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga Negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa.

Secara kultural bernegara adalah membangun pola kehidupan yang dijaga oleh kekuatan konstitusional dan kedaulatan penuh yang diakui oleh negaea lainnya.

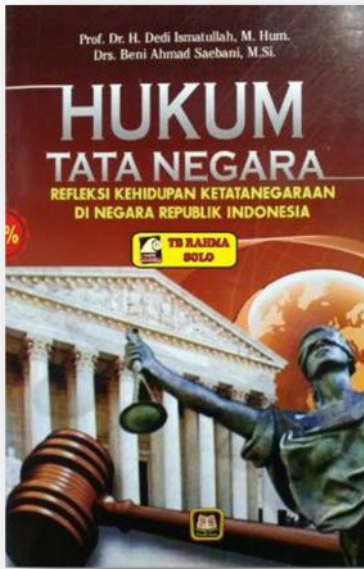
Indonesia sebagai bangsa dan negara telah menetapkan hakikat jati dirinya melalui sejarah perjuangan dan pembentukan kedaulatan melalui kekuasaan monarki dan raja-raja kharistik seperti Tarumanegara dan Negara Kertagama. Setelah Indonesia merdeka dan memproklamirkan diri sebagai Negara Republik, maka konstitusi negara ,yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum yang paling ideal untuk tegaknya penyelenggaraan negara.

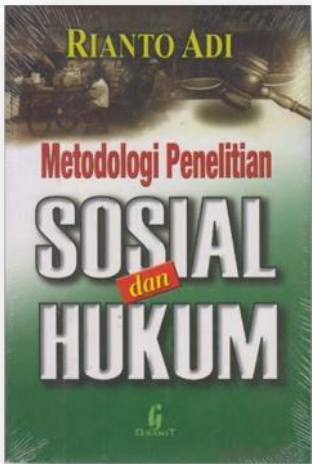
Bagaimana strategi penyelenggaraan suatu negara dan mengapa memerlukan penataan sinergis diantara semua peraturan perundangan yang berlaku? jawabannya terdapat pada Hukum Tata Negara, yaitu seperangkat peraturan dan berbagai ketentuan dalam mengurus dan menyelenggarakan negara. Hukum tata negara merupakan pedoman atau tolok ukur bernegara yang benar menurut peraturan perundangan yang berlaku. Suatu negara yang diselenggarakan tanpa berpedoman kepada tata hukum yang benar, akan berakhir dengan kehancuran, sebagaimana pentingnya pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi dan administrasi ketatanegaraan, maka negara akan mengalami keterpurukan seperti kota mati tak berpenghuni atau wujuduhu kodamihi, artinya keberadaan bagaikan ketiadaan.

Peranan Perma & Sema

Author : Fauzan
No. Class : 348.598 FAU p

Description: Mengingat urgensi PERMA dan SEMA dalam konteks pengisi kekosongan hukum, pelengkap kekurangan hukum, sarana penegakkan hukum, sarana penemuan hukum, dan sebagai sumber hukum yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, berdampak pada persoalan publik maupun privat, maka penyusun terpanggil untuk menginovasi pelacakan suatu PERMA dan SEMA dalam bentuk textbook yang mudah dan cepat melacak, mudah dan cepat mencari, , dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode kronologis nomor dan tahun PERMA dan SEMA, metode alfabetika tematik, dan metode indeks, sehingga sangat membantu para praktisi, akademisi dan publik. PERMA dan SEMA sangat penting sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia dalam praktik peradilan dan hukum Indonesia. PERMA dan SEMA juga sebagai bagian dari landasan hukum yang dipedomani dan dipertimbangkan hakim dalam me-manage peradilan dan memutus perkara.





Metodologi penelitian social dan Hukum

Author : Rianto Adi
No. Class : 001.42 ADI m

Description : Dalam buku ini dibahas tentang apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian dari awal hingga akhir: merumuskan masalah, mendalami masalah penelitian untuk lebih mempertajam fokus, merumuskan kerangka teori atau hipotesis, menentukan metode penelitian yang sesuai, mengumpulkan dan mengolah data, analisis dan interpretasi data, dan akhirnya menulis hasil laporan penelitian, yang kesemuanya itu sesuai dengan tahapan perkuliahan metodologi penelitian. Penjelasan sendiri dipaparkan secara praktis, sehingga para pembaca dapat mengikuti dengan mudah.



Hukum tata Negara Indonesia pemikiran dan Pandangan

Author : Sri Soemantri
No. Class : 342.598 SOE h

Description: Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebelum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pembahasan pertama dalam buku ini (Bab 1) adalah tentang UUD 1945, kedudukan dan artinya bagi kehidupan berbangsa, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang sistem perubahan konstitusi dan penerapannya di Indonesia pada Bab 2, serta diakhiri dengan Bab 27 tentang tata penyelenggaraan administrasi negara di tingkat pemerintahan pusat..

Dalam Bab 6 buku ini memuat tulisan Permasalahan Hukum Tata Negara dan Politik dalam Perspektif Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Hukum Indonesia. Tulisan ini disampaikan pada sebuah pertemuan dengan nama Forum Komunikasi Bidang Hukum: Tanggapan Pendidikan Tinggi dalam Bidang Hukum Menghadapi Era Pasar Bebas..

Karena buku ini merupakan kumpulan pemikiran dalam masalah-masalah hukum tata negara yang dipilih dari berbagai tulisan dan makalah yang disusun oleh penulis, maka judul buku ini adalah Hukum Tata Negara Indonesia

Aspek hukum pengadaan barang dan Jasa

Author : Purwosusilo
No. Class : 352.53 PUR a

Description: Kaitan antara pengadaan barang/jasa dan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktik rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat multi-aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya.

Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, kebebasan dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada regulasi. Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan oleh persyaratan pelelangan dan isi kontrak serta terpenuhinya syarat kewenangan bagi pejabat pembuat kontrak. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip, dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah. Kelima, mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan APBN. Keenam, memperhatikan kepentingan umum? penyediaan fasilitas umum (public utility) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Ketujuh, instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat kontrak

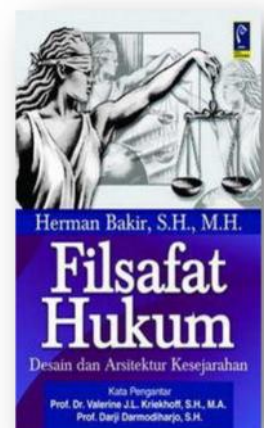


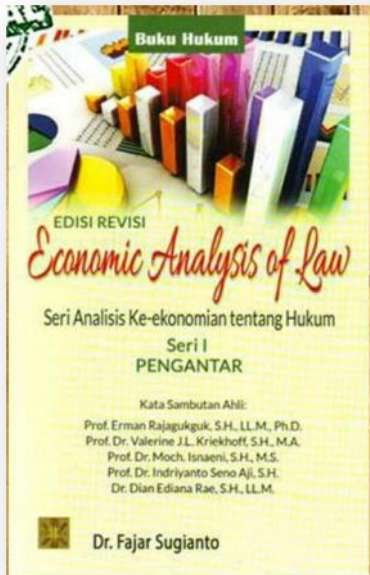
Filsafat Hukum Desain Dan Arsitektur Kesejarahan

Author : Herman Bakir
No. Class :340.1 BAK f

Description: Dalam buku ini, penulis mempersepsikan masa lampau dari disiplin teoretikal tertua di bidang hukum yaitu Filsafat Hukum, dengan menerobos ke dalam lingkup berpikir historiografikal dan kronologikal serta memanfaatkan sejumlah analisis dan kritik di beberapa tempat eksotis terhadap sensasi - sensasi yang di asumsikan berkecambah sebagai benalu di struktur pohon ilmu pengetahuan sejak dua abad terakhir. Pembahasan di dalamnya mengkrusialkan "doktrin defragmentasi" yang kemudian dinyatakan tentang aksi penataan ulang terhadap sejumlah aliran yang terpecah - pecah atau berserakan di menara-menara gading Filsafat Hukum.

Buku ini demikian komprehensif, disertai pembahasan yang lugas dan sekaligus merupakan referensi yang tidak bisa diabaikan oleh para penstudi bidang hukum serta demikian penting bagi para mahasiswa dan akademis secara umum.





Economic analysis of Law

Author : Sugianto, Fajar
No. Class : 343.074 SUG e

Description: Fenomena hukum terjadi pada saat relasi sosial yang baik dibutuhkan oleh hukum. Penulis melalui perspektifnya mengungkapkan esensi Economic Analysis of Law yang menambah syarat-syarat dasar yang diperlukan hukum untuk memperbaiki fenomena ini. Prinsip-prinsip umum Economic Analysis of Law yang digulirkan oleh Penulis melalui seri pengantar ini juga menitikberatkan kepada solusi perbaikan hukum dengan mempromosikan the primacy of economic efficiency sebagai salah satu konsep penting di dalam perumusan ide-ide perbaikan hukum tersebut. Buku ini sangat tepat dibaca oleh aparat penegak hukum, pengambil kebijakan publik, mahasiswa, serta akademisi dan mereka yang melihat adanya intersection antara law and economy yang perlu dikaji secara interdisipliner. --Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H. (Universitas Atma Jaya Jakarta)

--Karya ilmiah yang melengkapi kekayaan ilmu hukum, terutama pendekatan pragmatis tentang economic efficiency secara keilmuan. Saya menyambut baik dan terus mengharapkan sumbangsih keilmuan Saudara Penulis melalui karya-karya berikutnya. Buku ini sangat berguna untuk mengungkapkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas melalui the economic conception of justice--

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., . (Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

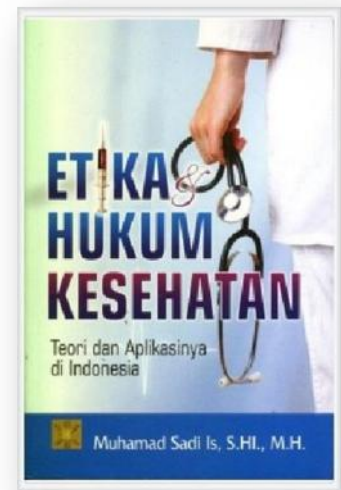
--Dominasi epistemologi ilmu hukum kelsenian dalam pengembangan ilmu hukum Indonesia membuat ilmu hukum Indonesia terisolir dari perkembangan epistemologi ilmu pengetahuan dan kehilangan jangkauan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi lingkungan sosial keilmuannya. Perkembangan jumlah lulusan pendidikan tinggi ilmu hukum yang berbanding lurus dengan perkembangan berbagai permasalahan hukum menunjukkan diskorelasi serius antara ilmu hukum yang dikembangkan dengan persoalan-persoalan nyata yang memerlukan respons lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum. Buku ini merupakan contoh penerapan epistemologi ilmu hukum postmodern dan merupakan harapan baru dalam menerobos kebuntuan epistemologi ilmu hukum Indonesia.--

Dr. Ida Bagus Wyasa Putra (Universitas Udayana)

Etika hokum kesehatan teori dan aplikasinya

Author : Sadi Muhammad
No. Class : 344.032.1 SAD e

Description: Hukum Kesehatan merupakan spesialisasi dalam Ilmu Hukum yang relard masih baru di Indonesia. Hukum Kesehatan mencakup segala peraluran yang secara langsung berkagan dengan pemeliharaan dan peraviatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Dalam perspektif ini, Hukum Kesehatan mencakup penerapan Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang berkagan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Menyadari kelangkaan buku ajar (textbook) untuk mata kuliah Hukum Kesehatan ini, mendorong kalangan akademisi untuk merumuskan dan membahas tema utama kajian Ilmu Hukum, sebagaimana disajikan datam buku ini. Membahas 10 topik ulama: (1) Hukum kesehatan di Indonesia; (2) Politik hukum kesehatan; (3) Teori hukum kesehatan; (4) Hukum malapraktik; (5) Hukum kebidanan; (6) Hukum kedokteran; (7) Hukum rumah sakil; (8) Hukum kefarmasian; (9) Hukum rekam medis/rekam kesehatan; dan (10) Kode etik profesi. Buku pegangan utama untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan ini bisa juga menjadi referensi penting bagi kalangan praktisi, seperti hakim dan pengacara, kedokteran, kebidanan, serta tenaga medis dan farmasi.



Pertanggungjawaban pidana Korporasi

Author : Muladi
No. Class : 346.066 MUL p

Description: Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang - undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang - undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori - teori yang mendasarinya.

